

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN PADA KEGIATAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN DI KECAMATAN BANYUASIN I KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Lismiana¹, Didik Susetyo², Andries Lionardo³

^{1,2,3} Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Sriwijaya

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan pada kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Banyuasin 1 Kecamatan Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan materi audio visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PNPM Perdesaan pada kegiatan kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Banyuasin I belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh kegiatan bantuan kepada kelompok sasaran setelah dana pinjaman yang disalurkan belum terlaksana dengan baik, terutama bantuan pada pengembangan institusi belum tercapai seperti yang diharapkan, tetapi sosialisasi dan pelatihan telah berjalan dengan baik. Manfaat dari program ini belum semuanya tercapai, pelaksana koordinasi tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, proses verifikasi tidak dilakukan secara langsung masing-masing kepada setiap anggota kelompok sesuai dengan SOP, dana pencairan pinjaman disetujui oleh Persetujuan Pinjaman Tim sama dengan yang diterima oleh grup. Namun, tersdapat tenggat waktu penundaan untuk pencairan dana, pengembangan kemajuan kelompok belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan UPK sendiri jarang melakukan pembinaan, serta pemantauan dan pelaporan belum berjalan sesuai SOP. Administrasi dan pelaporan manajemen dokumen dilakukan sepenuhnya oleh UPK. Namun, manajemen dokumen dan administrasi oleh kelompok sasaran belum sepenuhnya dilakukan oleh kelompok. Faktor lingkungan mempengaruhi pelaksanaan program ini, yaitu faktor budaya masyarakat menganggap bahwa dana SPP sebagai hibah dan tidak perlu dikembalikan, faktor sosial yaitu anggota kelompok trauma untuk terlibat lagi dalam program, faktor ekonomi, ketika anggota kelompok miskin sulit membayar cicilan menjadi faktor penghambat program. Tetapi faktor politik, dengan dukungan pemerintah, masyarakat dan tokoh masyarakat menjadi faktor pendukung program tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, PNPM Pedesaan, Kelompok Simpan Pinjam Perempuan

Abstract. *This study aims to determine the implementation of the National Program for Community Empowerment (PNPM) Rural on the activities of Savings and Loans Women group in Subdistrict Banyuasin 1 District Banyuasin South Sumatra Province. The method used is descriptive qualitative method and the data obtained through observation, interviews, documentation and audio-visual material. The results showed that the implementation of PNPM Rural on the activities Women's Savings and Loans groups in the Subdistrict Banyuasin I have not been completely worked well. This is demonstrated by the activities of assistance to the target group after the loan funds disbursed have not been implemented well, especially assistance on institutional development has not been achieved as expected, but the socialization and training has been going well. The benefit of the program is not yet all been achieved, coordination implementor not carried out according to the SOP, the verification process is not done directly each to each member of the group in accordance with the SOP, the funds disbursement of loans approved by the Team Loan Approval equal to that received by the group. However, there is a delay deadline for disbursement of funds, the development of the group's progress has not been implemented in accordance with procedures and UPK themselves rarely do the coaching, as well as monitoring and reporting has not been going*

according to SOP. Document management administration and reporting are done completely by UPK. However, document management and administration by the target group has not been entirely carried out by the group. Environmental factors affect the implementation of this program, namely cultural factors society considers that SPP funds as grants and do not need to be returned, the social factors that trauma group members to get involved again in the program, economic factors, when members of the group are poor it difficult to pay the installments to be a factor inhibiting the program. But political factors, with the support of the government, the community and public figures to be a factor supporting the program.

Keywords: Implementation, Rural PNPM, Women's Savings and Loans group

PENDAHULUAN

Paradoks antara pembangunan sosial dan ekonomi sangat disadari sebagai masalah paling krusial saat ini. Di Indonesia kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah klasik yang belum bisa dituntaskan hingga saat ini. Pengangguran dan kemiskinan sangatlah erat kaitannya. Pengangguran dapat menimbulkan kemiskinan, dan sebaliknya kemiskinan dapat pula menimbulkan pengangguran. Orang yang tidak bekerja secara otomatis tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia berada dalam kondisi miskin. Sebaliknya pengangguran dapat melahirkan kemiskinan. Orang miskin yang ditandai oleh rendahnya pendapatan, rendahnya pendidikan, keterampilan dan akses pada sumber-sumber informasi dan kesempatan sosial, akan sangat sulit memperoleh pekerjaan (Suharto, 2005: 22).

Pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara, telah melakukan program pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan perluasan kesempatan bagi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin dengan sasaran utama yang selalu mendapat perhatian yaitu kemiskinan dan pengangguran, juga target tujuan pembangunan millenium (MDGs) adalah menghapuskan kelaparan dan kemiskinan (Anger, 2010: 143).

Meskipun masyarakat miskin telah mendapatkan bantuan program pengentasan kemiskinan, tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Masyarakat miskin yang telah tersentuh program pengentasan kemiskinan, tetap saja tidak beranjak dari kondisi kemiskinannya. Karena itu, mungkin terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tersebut. Untuk memperbaiki kekeliruan paradigmatic

penanggulangan kemiskinan telah muncul strategi penanggulangan kemiskinan baru melalui program pemberdayaan masyarakat secara komprehensif. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. PNPM Mandiri diluncurkan pada tanggal 30 April 2007 di kota Palu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sulawesi Tengah melalui KEPMENKO KESRA No.25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,31 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2014 yang sebesar 28,28 juta orang (11,25 persen). Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan sebanyak 10,65 juta orang (8,29%) pada Maret 2015, sementara di daerah perdesaan sebanyak 17,94 juta orang (14,21 %) pada Maret 2015 (BPS, 2015). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2015 sebesar 5,81 persen meningkat dibandingkan TPT Februari 2014 (5,70 persen). Disini terlihat bahwa meskipun Pemerintah telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Masyarakat miskin yang telah tersentuh program pengentasan kemiskinan, tetap saja tidak beranjak dari kondisi kemiskinannya.

Di Provinsi Sumatera Selatan persentase penduduk miskin melebihi persentase angka kemiskinan rata-rata Indonesia yaitu 13,62 % dari total penduduk Sumatera Selatan. Jumlah penduduk miskin pada bulan September 2014 tercatat 1.085.795 jiwa, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari tahun 2015 mencapai 5,03 persen mengalami peningkatan dibandingkan TPT Februari tahun 2014 yang sebesar 3,84 persen. Dengan banyaknya jumlah penduduk miskin dan peningkatan pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan maka pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan sangat membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat melalui program-program penanggulangan kemiskinan. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi.

Dari hasil Susenas, tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyuasin menunjukkan peningkatan pada periode 2012 – 2013. Pada tahun 2013, persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyuasin sebesar 12,2 persen mengalami peningkatan dibanding tahun 2012 sebesar 11,3 persen. Kecamatan Banyuasin 1 tahun 2014 merupakan kecamatan yang memiliki penduduk miskin terbanyak. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penerima beras raskin yang diterima oleh kecamatan Banyuasin I paling banyak diantara kecamatan di Kabupaten Banyuasin, yaitu mencapai 3.802 kepala keluarga. Walaupun Kecamatan Banyuasin I telah menjadi salah satu kecamatan penerima PNPM Mandiri Perdesaan sejak tahun 2001. Namun tujuan dari implementasi program PNPM Mandiri Perdesaan nampaknya belum sesuai dengan harapan.

Salah satu usulan kegiatan yang dapat didanai dalam PNPM Mandiri Perdesaan berdasarkan Surat Dirjen PMD Kemendagri Nomor : 402/303/PMD Tanggal 13 Januari 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk kelompok perempuan (SPP). Kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan

untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Melihat kondisi tersebut, maka penelitian ini memilih

Kecamatan Banyuasin I sebagai obyek penelitian karena Kecamatan Banyuasin I menjadi salah satu kecamatan penerima PNPM Mandiri Perdesaan pada kegiatan SPP sejak tahun 2003. Selain itu, Kecamatan Banyuasin I masih banyak terdapat masyarakat miskin. Kecamatan Banyuasin I sudah berpartisipasi dalam PNP Mandiri Perdesaan sejak tahun 2001. Namun demikian, semenjak dilaksanakannya PNPM Mandiri Perdesaan dibidang Simpan Pinjam Kelompok Perempuan terdapat berbagai fenomena. Fenomena yang terjadi yaitu lambatnya pengembalian dana pinjam oleh kelompok SPP kepada pengelola SPP, yang mengakibatkan dana tersebut tidak dapat segera dimanfaatkan untuk perguliran dana lebih lanjut.

Angsuran pinjaman Simpan Pinjam kelompok Perempuan pada UPK Kecamatan Banyuasin I dengan angsuran pokok menunggak di atas 6 kali Sampai dengan 1 Januari 2015 mencapai Rp. 427.332.800. Penunggakan angsuran diatas 6 kali dilakukan paling banyak oleh kelompok SPP di Kelurahan Mariana Ilir yaitu mencapai Rp. 206.100.200. Lambatnya pengembalian dana ini dimungkinkan karena proses verifikasi terhadap kelompok yang berjalan belum optimal. Belum optimalnya pelaksanaan verifikasi oleh tim verifikasi menunjukkan bahwa substansi kebijakan yang dibuat perumus kebijakan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh *implementor* dan *target group* akibat adanya kendala dalam implementasi program.

Berlatar belakang pada permasalahan yang ada dan mengingat pentingnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada Kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan di Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan hubungan pemerintah dengan lingkungannya seperti yang ditegaskan oleh Eyestone (1971) dalam Agustino (2014: 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya". Kebijakan publik merupakan suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (*a project program of goals, values, and practices*) Laswell & Kaplan (1970) dalam Nugroho (2011: 93).

B. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Agustino, 2014: 139). Untuk mencapai tujuannya, implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program atau formulasi kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Nugroho (2011: 618) bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derikat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

C. Model Implementasi Kebijakan

1. Model Mazmanian dan Sabatie

Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa variabel, seperti yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005: 94), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi:

a. Mudah tidaknya masalah dikendalikan (*tractability of the problem*) yang

mencakup variabel-variabel seperti (1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, (2) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran, (3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, (4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan (Subarsono, 2005: 95-96):

b. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturisasikan proses implementasi (*ability of statute to structure implementation*) yang mencakup variabel variabel seperti (1) Kejelasan isi kebijakan, (2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoretis, (3) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut, (4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar instansi pelaksana, (5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, (6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, (7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan (Subarsono, 2005: 97-98).

a. Variabel diluar kebijakan/variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*) yang mencakup variabel-variabel seperti. "(1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, (2) Dukungan publik terhadap kebijakan, (3) Sikap dari kelompok pemilih (*constituent groups*), (4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor " (Subarsono, 2005: 98-99).

2. Model Randall B. Ripley dan Grace

A. Franklin

Pendapat lain mengenai implementasi kebijakan diungkapkan oleh Ripley and Franklin dalam bukunya berjudul *Policy Implementation and Bureaucracy*. Menurut Ripley and Franklin (1986 : 232-233), setidaknya terdapat tiga perspektif untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:

a. *Degree of compliance* (Tingkat kepatuhan).

b. *Smoothly functioning routine and absence of problems*, bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan kelancaran rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi.

c. *Impacts from whatever program is being analyzed* (terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki).

3. Model Smith

Menurut Smith 1973 (dalam Tachjan (2006:37) dalam proses implementasi kebijakan ada empat aspek yang perlu diperhatikan. Empat aspek dalam implementasi kebijakan publik tersebut meliputi :

a. *Idealized Policy* (Kebijakan yang diidealkan).

Aspek *Idealized Policy* yaitu pola-pola interaksi ideal yang didefinisikan dalam kebijakan dan berusaha diinduksikan oleh perumus kebijakan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang *target group* melaksanakannya.

b. *Target Group* (Kelompok sasaran). Kelompok orang yang dipengaruhi kebijakan secara langsung dan harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan.

c. *Implementing Organization* (Organisasi Pelaksana).

Badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan.

d. *Environmental Factor* (Faktor Lingkungan).

Unsur-unsur lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh program seperti unsur budaya, sosial dan ekonomi yang sifatnya akan mendukung atau menghambat implementasi program.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini desain penelitian kualitatif yang digunakan adalah *desain penelitian kualitatif*. Penelitian ini fokus membahas bagaimana PNPM Mandiri Perdesaan pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian, maka terdapat empat aspek yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu : *Idealized Policy* (kebijakan yang diidealkan), *Target Group* (Kelompok Sasaran), *Implementing Organization* (Organisasi Pelaksana) dan *Environmental Factor* (faktor Lingkungan).

Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan cara *Purposif*. Informan dalam penelitian ini berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang, yang terdiri dari 18 (delapan belas) orang dari unsur implementor dan 5 (lima) orang dari unsur masyarakat.

Jenis dan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : observasi, wawancara, dokumentasi, dan materi audio visual.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verfication*. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negative menggunakan bahan referensi, dan mengadakan member check

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana implementasi PNPM Mandiri Perdesaan pada Kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan di Kecamatan Banyuasin I, penulis akan melakukan kajian terhadap beberapa aspek yaitu *idealized policy, target group, implementing organization* dan *environmental factor*.

A. *Idealized Policy*

1. Sosialisasi

Adapun temuan lapangan pada aspek sosialisasi adalah sebagai berikut:

- Sosialisasi dalam bentuk tulisan dengan terdapatnya Petunjuk Teknis PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk kegiatan SPP terdapat pada penjelasan IV Jenis dan Proses Pelaksanaan bidang Kegiatan. Sosialisasi PTO hingga ke UPK di kecamatan, kemudian UPK kecamatan Banyuasin I meneruskan dengan membuat SOP BKAD, SOP BPUPK dan SOP UPK. Dimana didalamnya terdapat mekanisme pencairan dana SPP yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat melalui Musyawarah Antar Desa dan Musyawarah Desa.
- Adanya sosialisasi program oleh fasilitator kabupaten kepada fasilitator

- kecamatan dan UPK serta kelembagaannya. Sosialisasi program juga dilakukan pada saat Musyawarah Antar Desa, MAD khusus Perempuan dan Musyawarah Desa.
- c. Sosialisasi dilakukan tentang substansi program.
 - b. Pelatihan *target group* (kelompok SPP) dihadiri oleh ketua dan sekretaris kelompok dengan materi pelatihan tentang pembuatan administrasi kelompok dilakukan sebelumpencairan dana pinjaman SPP.

Kegiatan sosialisasi telah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan implementor tentang program sehingga dapat mendukung efektifnya implementasi program. Hal ini menunjukkan secara umum bahwa substansi program telah tersampaikan dengan jelas dan konsisten melalui kegiatan sosialisasi, walaupun masih ada pengecualian pada kelompok yang mengalami hambatan yang disebabkan pengaruh faktor lingkungan. Hal ini sejalan dengan pendapat Edwards III (dalam Winarno, 2012: 178) bahwa jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Sosialisasi program harus dilakukan dengan sejelas mungkin agar dapat meningkatkan kelancaran pelaksanaan program. Seperti pendapat Tachjan (2006: 9) bahwa salah satu langkah yang dapat diambil oleh para pengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas desain kebijakan dalam rangka memperlancar pelaksanaannya adalah pengambil kebijakan harus menjelaskan tujuan-tujuan dari kebijakan dan urutan relatifnya dengan cara yang sejelas mungkin. Penjelasan mengenai tujuan-tujuan ini dapat berfungsi sebagai suatu instruksi yang jelas bagi para pelaksana mengenai apa yang sebenarnya diharapkan mereka lakukan dan bagaimana prioritas yang harus mereka berikan terhadap tugas-tugas tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pada aspek *idealized policy* pada kegiatan sosialisasi program kepada implementor sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Namun, kegiatan sosialisasi program kepada *target group* belum berjalan dengan baik.

2. Pelatihan

Temuan lapangan pada aspek pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. Pelatihan Implementor (BKAD, BPUPK, UPK dan Tim verifikasi) dilakukan 1 tahun .

Kegiatan pelatihan telah meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan implementor tentang program. Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa substansi program telah tersampaikan dengan jelas dan konsisten melalui kegiatan pelatihan bagi implementor lapangan. Dengan pelatihan maka pengetahuan implementor akan meningkat sehingga akan meningkatkan pemahaman dan kemampuan implementor tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian Anwas (2009) dalam Anwas (2013: 24) menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kompetensi. Kegiatan pelatihan yang terpenting bukan lamanya waktu pelatihan, akan tetapi frekuensi kegiatan pelatihan. Dengan banyaknya frekuensi pelatihan, berarti individu tidak hanya lebih sering mendapatkan ilmu pengetahuan baru akan tetapi mendapatkan aspek lain yang berguna untuk meningkatkan kemampuannya. Hal ini juga di dukung oleh pendapat Menurut Schemerhorn, et,al., (1997) dalam Sjafari (2014: 55) bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan proses seseorang memperoleh kompetensi dan kepercayaan dirinya yang mempengaruhi perilakunya. Pelatihan akan mempengaruhi pemahaman target group dalam implementasi program. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Eriva, dkk (2013: 11) bahwa pelatihan berpengaruh terhadap pemahaman tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pelatihan yang diikuti tenaga kerja sesuai dengan bidang pekerjaannya maka akan semakin terampil dan berkualitas tenaga kerja tersebut terhadap pemahaman. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi program yang dianalisis pada aspek *idealized policy* pada kegiatan pelatihan bagi implementor program sudah berjalan dengan baik. Secara umum dapat dikatakan bahwa faktor kegiatan pelatihan merupakan pendorong efektifnya implementasi program PNPM Mandiri Perdesaan pada kegiatan SPP di kecamatan Banyuasin I.

B. Target Group (Kelompok sasaran)

1. Pelaksanaan Pendampingan dan Pemberdayaan kepada *target group*

Temuan lapangan pada aspek pendampingan/pemberdayaan adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan awal dilakukan tentang pembuatan proposal. Pendamping Lokal membErikan contoh proposal dan formulir proposal yang kosong yang kemudian kelompok membuat proposal berdasarkan contoh tersebut.
2. Pendampingan juga dilakukan dengan memberitahukan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh kelompok.
3. Pendampingan pada saat pencairan dana pinjaman yaitu kelompok diingatkan kembali untuk membuat pembukuan/administrasi kelompok, serta mematuhi aturan kelompok dan kesepakatan membuat tabungan. Namun demikian, pada kenyataannya tidak semua anggota kelompok memiliki tabungan.

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang memerlukan waktu dan tindakan nyata secara bertahap dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, dalam kegiatan pemberdayaan diperlukan kegiatan pendampingan (Anwas, 2013: 98). Pendampingan merupakan salah satu kemampuan yang sangat perlu dimiliki oleh agen pemberdayaan. Pendampingan ini tugasnya bukan menggurui, tetapi lebih tepat sebagai fasilitator, komunikator, dinamisator, dan pembimbing kelompok (masyarakat) di lapangan. Kemampuan yang harus dimiliki dalam aspek pendampingan meliputi: kemampuan membErikan motivasi untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan, kemampuan dalam meningkatkan kesadaran bahwa kelompok (masyarakat) termasuk keluarga miskin memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk berubah dalam meningkatkan kualitas kehidupannya. Potensi yang ada dalam masyarakat ini perlu digali.

Dalam kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan di kecamatan Banyuasin I, pendampingan juga perlu memiliki kemampuan dalam meningkatkan kemampuan dasar yang diperlukan anggota kelompok agar dapat memecahkan

permasalahan yang ada dalam kelompok, pendampingan kepada kelompok agar lebih mengembangkan kelompoknya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dengan berkembangnya usaha dan kelompok tersebut. Hal ini sejalan dengan pemikiran Anwas (2013: 76) bahwa pendampingan perlu memiliki kemampuan dalam meningkatkan kemampuan dasar yang diperlukan oleh masyarakat, misalnya identifikasi masalah, memecahkan masalah, mengambil keputusan dan sebagainya. Disisi lain pendamping juga harus mampu sebagai penghubung masyarakat dengan berbagai lembaga yang terkait dan diperlukan bagi pengembangan kelompok. Pendampingan dalam pemberdayaan juga dituntut memiliki kemampuan untuk memiliki interaksi atau membangun hubungan dengan setiap keluarga yang ada di masyarakat. Keberhasilan pendampingan ditandai adanya perubahan perilaku dalam aspek peningkatan kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraannya.

Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi program yang dianalisis pada aspek *target group* melalui kegiatan pendampingan dan pemberdayaan bagi *target group* pada saat pembuatan proposal dan pendampingan pembuatan pembukuan sebelum pencairan telah terimplementasi dengan baik. Serta adanya partisipasi anggota kelompok melalui pengumpulan dana tabungan bagi beberapa kelompok, dan tabungan tanggung renteng. Namun, respon positif dari kelompok hanya dilakukan oleh beberapa kelompok saja, tidak semua kelompok di kecamatan Banyuasin I melaksanakannya.

2. Kemanfaatan program bagi *target group*

Temuan lapangan pada aspek kemanfaatan program adalah sebagai :

- Kegiatan SPP membErikan manfaat bagi terpenuhinya kebutuhan dasar anggota kelompok SPP dengan bertambahnya modal bagi usaha anggota kelompok.
- Kegiatan SPP membErikan kesempatan anggota kelompok meningkatkan ekonomi keluarga melalui pendanaan modal usaha. Namun, tidak semua anggota kelompok memiliki usaha, sehingga dana SPP dipergunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

- Tujuan kegiatan SPP belum mendorong kelembagaan SPP oleh kaum perempuan. Dan Tujuan kegiatan SPP agar kelompok mempunyai penguatan kelembagaan kelompok belum tercapai.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Grindle (dalam Agustino, 2014: 155) amat ditentukan oleh kebijakan itu sendiri, salah satunya yaitu tipe manfaat (*type of benefits*), dalam suatu kebijakan harus terdapat dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Namun, pada implementasi kegiatan SPP, upaya pendampingan implementor terhadap *target group* melalui kunjungan ke kelompok dan melakukan pembinaan terkait pengembangan usaha dan penguatan kelembagaan kelompok dilakukan dengan tidak optimal karena selain pembinaan biasa dilakukan bersamaan dengan verifikasi kelompok tetapi juga terkadang ada anggota yang tidak hadir dalam pembinaan. Sehingga tujuan program agar kelompok dalam mempunyai penguatan kelembagaan kelompok belum tercapai secara maksimal. Hal ini sama dengan hasil penelitian Lubis dan Harahap (2014: 223) bahwa masih kurang maksimalnya manfaat dan perubahan yang di peroleh dikarenakan sasaran dari program yang kurang tepat.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi PNPM Mandiri Perdesaan pada kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan di kecamatan Banyuasin I pada aspek *target group* melalui kemanfaatan program bagi masyarakat (*target group*) belum tercapai.

3. Pelaksanaan koordinasi dengan *targetgroup*

Temuan lapangan pada aspek pelaksanaan koordinasi adalah sebagai:

- Koordinasi implementor (UPK) tidak dilaksanakan sesuai SOP, yaitu 1 bulan sekali melainkan dilakukan lebih dari 1 bulan sekali bahkan mencapai 2-3 bulan sekali.
- Koordinasi dilakukan bersamaan dengan waktu verifikasi kelompok baru, sehingga tidak berjalan dengan maksimal.
- Adanya anggota kelompok yang tidak hadir saat koordinasi dan pembinaan dari UPK.

Koordinasi harus dijalankan dengan baik agar implementasi kebijakan atau program dapat berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Hood (dalam Wahab, 2012:174) yang menyatakan komunikasi dan koordinasi antar lembaga terkait berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana proses penyampaian informasi, isi dan tujuan kebijakan kepada kelompok sasaran. Dalam melakukan komunikasi, juga diperlukan koordinasi dengan pihak terkait agar tidak terdapat hambatan dalam komunikasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Pressman dan Wildavsky (dalam Sidney, 2007:89) yang menyatakan tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus diperinci dan dikoordinasikan serta dikomunikasikan dengan pihak terkait dalam kebijakan agar tujuan kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam keberhasilan implementasi program. Hal ini juga sesuai dengan penelitian (Igirisa dan Isa, 2014:87) bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan program yaitu faktor internal yang terdiri dari sumberdaya pelaksana dan sasaran kebijakan, komunikasi antara pelaksana kebijakan, dan adanya komitmen bersama dari aparat pelaksana kebijakan.

Berdasarkan analisa pada fokus implementasi program PNPM mandiri perdesaan pada kegiatan SPP dari aspek *target group* dapat dipahami bahwa unsur *target group* yaitu kelompok SPP, belum maksimal dalam koordinasi anggota dengan *implementor* dalam program. Dari analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi PNPM Mandiri Perdesaan pada kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan pada aspek *target group* melalui kegiatan koordinasi dengan *target group* belum terimplementasi dengan baik, hanya koordinasi antara *implementor* sendiri yang sudah berjalan dengan baik.

C. Implementing Organization (Organisasi Pelaksana)

1. Proses Verifikasi kelompok SPP

Temuan lapangan pada aspek verifikasi adalah sebagai:

1. Verifikasi persyaratan kelompok tidak dilaksanakan sesuai PTO, dimana kelompok harus berusia 1 tahun. Namun

kenyataannya, ada kelompok yang baru dibuat saat akan mengajukan proposal pinjaman dana SPP.

2. Beban kerja Tim verifikasi terlalu besar.
3. Verifikasi dilakukan tidak sesuai PTO, karena tidak melihat kebenaran ada tidaknya usaha anggota kelompok.

Besarnya kelompok sasaran mempengaruhi implementasi program. Seperti yang dikemukakan oleh Tachjan (2006: 5) bahwa besarnya kelompok sasaran juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap implementasi program, karena semakin besar dan semakin beranekaragam kelompok sasaran tersebut, maka akan sulit untuk mempengaruhi perilakunya ke arah yang diinginkan. Verifikasi yang hanya dilakukan secara administrasi tidak akan optimal. Sehingga terjadi kekeliruan dalam penentuan layak atau tidaknya suatu kelompok (*target group*). Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan pada kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan di kecamatan Banyuasin I pada aspek *implementing organization* melalui kegiatan verifikasi kelompok SPP belum berjalan dengan baik.

2. Pencairan dana Pinjaman SPP

Temuan lapangan pada aspek pencairan dana pinjaman SPP adalah sebagai:

1. Pencairan pinjaman harus dihadiri oleh semua anggota kelompok dan disaksikan langsung oleh pengurus UPK.
2. Batas waktu pencairan dana SPP melebihi batas waktu pencairan menurut SOP yaitu maksimal 1 bulan semenjak memasukkan proposal. Namun kenyataannya pencairan dana pinjaman SPP mencapai 2-3 bulan bahkan lebih.
3. Masih adanya penunggakan pembayaran SPP oleh kelompok. Karena dana pinjaman disalahgunakan oleh ketua kelompok.
4. Penunggakan angsuran di beberapa desa menyebabkan desa tersebut tidak dicairkan pinjaman dana SPP tahun berikutnya.

Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan pada kegiatan simpan Pinjam kelompok Perempuan di kecamatan Banyuasin I pada aspek *implementing organization* melalui kegiatan pencairan

dana pinjaman belum berjalan sesuai prosedur yang ada.

3. Pembinaan terhadap *Target Group*

Temuan lapangan pada aspek pelaksanaan koordinasi adalah sebagai:

1. Pembinaan tidak dilakukan sesuai SOP bahwa harus dilakukan setiap bulan. Namun, dilaksanakan hanya 3 bulan sekali. Hanya beberapa kelompok saja yang dilakukan 1 bulan sekali.
2. Pembinaan tentang perkembangan kelompok belum berjalan dengan baik, bahkan cenderung kurang.

Keberhasilan kegiatan SPP ini sangat tergantung akan pengetahuan kelompok sasaran akan substansi program dan untuk mendorong agar kelompok menerapkan pengetahuan mereka akan substansi program tersebut maka pembinaan harus terus dilakukan secara terus-menerus. Hal ini sejalan dengan pendapat Sjaafari (2014: 34) bahwa didalam usaha pembinaan kelompok, sistem komunikasi antar kelompok harus senantiasa diperhatikan dan diperbaiki. Apabila terputus, kehidupan kelompok akan terganggu. Keberhasilan kegiatan SPP ini tergantung oleh pembinaan yang harus dilakukan melalui komunikasi secara terus-menerus untuk meningkatkan partisipasi anggota kelompok dalam hal pembukuan administrasi, meningkatkan partisipasi anggota kelompok untuk terlibat aktif dalam hal menghadapi kendala dalam kelompok dan pengembangan dan pelestarian kelompok. Sehingga diharapkan, kelompok tersebut akan tetap bertahan bahkan lebih berkembang daripada sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Anwas (2013: 182) bahwa tahapan pembinaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas, perbaikan berbagai aspek manajemen, serta merangsang peningkatan partisipasi masyarakat, kendala atau masalah yang dihadapi masyarakat dipecahkan sesuai dengan kekuatan dan kebersamaan dalam masyarakat. Oleh karena itu komunikasi dilakukan untuk kelompok tertentu dengan masalah dan kebutuhan yang dihadapi mereka. Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan pada kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan di kecamatan Banyuasin I pada aspek *implementing organization* melalui kegiatan pembinaan kelompok SPP belum berjalan dengan baik.

4. Monitoring dan Pelaporan

Temuan lapangan pada aspek monitoring dan pelaporan adalah sebagai:

- Kegiatan monitoring tidak dilakukan sesuai SOP yaitu harusnya dilakukan setiap tanggal 5 s/d 15 setiap bulannya. Hanya diutamakan kepada kelompok yang menunggak angsuran.
- Pengelolaan dokumen administrasi dan pelaporan telah dilakukan dengan lengkap oleh UPK.
- Pengelolaan dokumen dan administrasi dikelompok belum seluruhnya dilakukan oleh kelompok.
- BKAD membuat laporan keuangan organisasi. Namun tidak membuat laporan kegiatan dan laporan bulanan terkait fungsinya terhadap UPK.
- BPUPK belum memiliki mekanisme pelaporan yang transparan.

Menurut Tachjan (2006: 30) maksud dan sasaran utama pengawasan adalah untuk berusaha agar seluruh kegiatan operasional itu berlangsung dengan daya guna, hasil guna dan produktivitas yang tinggi dan dengan hasil pekerjaan yang memenuhi standar yang telah ditentukan serta terarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasional. Selain itu, evaluasi penting untuk dilaksanakan agar dapat mengetahui dan membandingkan hasil implementasi dengan hasil yang seharusnya dicapai. Sejalan menurut pendapat Tachjan (2006: 30) bahwa setelah tahap pelaksanaan kegiatan operasional telah selesai dilaksanakan maka perlu dilakukan penilaian, dengan maksud untuk memperoleh masukan yang tepat tentang perbandingan antara hasil yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.

Monitoring sangat berpengaruh kepada keberhasilan implementasi program. Hal ini sesuai dengan penelitian Indiahono, dkk (2012: 2) bahwa implementasi PNPM Mandiri Perdesaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ciri-ciri khas kelompok sasaran, para pejabat eksekutif, sosialisasi, komunikasi dan monitoring. Pengawasan harusnya dilakukan melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan dilakukan melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan dari BKAD, UPK, tim penanganan masalah sampai ke semua kelompok sasaran, namun pengawasan ini

jarang dilakukan bahkan hanya mendengarkan laporan atau keluhan pengurus kelompok saat membayar angsuran ke UPK. Salah satu penyebab fenomena tersebut adalah keterbatasan pembinaan karena terlalu banyaknya kelompok sasaran dan kurangnya kemauan kelembagaan dalam hal pengawasan ke desa yang cukup jauh. Aspek *implementing organization* melalui pelaporan dan monitoring yang dilakukan baik *implementor* maupun kelompok sasaran secara umum belum berjalan sesuai prosedur yang diharapkan.

D. *Environmental factor* (faktor lingkungan).

Temuan pada aspek faktor lingkungan adalah sebagai berikut:

- Faktor budaya dimana masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, yang mengasumsikan dana ini adalah uang negara yang dibagikan dan tidak perlu dikembalikan. Hal ini merupakan faktor penghambat program. Namun ini hanya terjadi pada beberapa desa saja seperti Desa Perambahan, desa Sungai Rebo dan Kelurahan Mariana Ilir.
- Faktor ekonomi, dimana Sasaran kegiatan SPP adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha. Dengan ketentuan masyarakat miskin tersebut dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan. Namun, karena kondisi anggota kelompok yang miskin, ada sebagian yang menyebabkan mereka kesulitan untuk membayar angsuran disaat usaha mereka mengalami kegagalan. Terutama bagi anggota yang berusaha di bidang pertanian padi. Hal ini merupakan faktor penghambat program. Serta, persaingan dari pihak lain. Berdasarkan laporan UPK diketahui bahwa jumlah kelompok SPP yang mendapatkan dana pinjaman SPP berkurang menjadi hanya 30 kelompok di bulan April tahun 2015 dari 121 kelompok tahun 2013. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya lembaga keuangan bank yang meminjamkan dana pinjaman kepada masyarakat di Kecamatan Banyuasin I dengan bunga yang lebih rendah. Yaitu adanya pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR)

- dengan bunga 0,5 % perbulan oleh Bank BRI. Hal ini merupakan faktor penghambat program.
- Faktor sosial, trauma anggota kelompok untuk terlibat dengan program SPP dengan terdapatnya persoalan minimnya kepercayaan anggota terhadap ketua kelompok yang disebabkan oknum pengurus lama tidak membayar angsuran mereka kepada UPK. Uang angsuran tersebut digunakan oleh ketua untuk pribadinya. Hal ini merupakan faktor penghambat program. Serta, adanya kesediaan anggota untuk menyetujui dan menerapkan tabungan tanggung renteng (tabungan yang harus ada dikelompok sebagai cadangan apabila ada anggota yang belum mampu membayar angsuran maka dipergunakan uang tersebut terlebih dahulu untuk membayar angsuran). Hal ini merupakan faktor pendukung program. Namun, ini juga berlaku hanya untuk beberapa kelompok saja.
 - Faktor Politik, yaitu adanya dukungan dari pemerintah (Camat, Kades/Lurah dan perangkatnya) dengan menyediakan kantor camat atau desa untuk sosialisasi di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Hal ini merupakan faktor pendukung program. Dukungan dari Kades yang menandatangani proposal anggota kelompok. Hal ini merupakan faktor pendukung program. Dukungan masyarakat dan tokoh masyarakat terhadap program dengan kehadiran pada acara sosialisasi. Hal ini merupakan faktor pendukung program.
- Pelatihan pada *Implementor* (BKAD, BPUPK, UPK dan Tim verifikasi) dilakukan 1 tahun sekali. Pelatihan *target group* (kelompok SPP) dihadiri oleh ketua dan sekretaris kelompok dengan materi pelatihan tentang pembuatan administrasi kelompok dilakukan sebelum pencairan dana pinjaman SPP (sesuai SOP UPK).
2. Kelompok Sasaran (*Target Group*) belum menerima sepenuhnya manfaat program dikarenakan :
- Kegiatan pendampingan kepada *target group* sebelum pencairan dan SPP yaitu pendampingan pembuatan proposal dan pendampingan pembuatan pembukuan kelompok secara umum telah terlaksana dengan cukup baik. Namun, Pendampingan kepada *target group* sesudah dana pinjaman dicairkan belum terimplementasi dengan baik terutama pendampingan tentang pengembangan kelembagaan belum tercapai sesuai yang diharapkan.
 - Kemanfaatan program belum semuanya tercapai.
 - Koordinasi *implementor* (UPK) tidak dilaksanakan sesuai SOP.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab *implementing organization* belum terlaksana dengan baik karena:
- Proses verifikasi tidak dilakukan langsung masing-masing kepada setiap anggota kelompok sesuai ketentuan PTO, namun semua dikelompok di desa/kelurahan dikumpulkan dalam satu tempat untuk diverifikasi.
 - Besar dana pencairan dana pinjaman yang disetujui oleh Tim Pemutus Pinjaman sama dengan yang diterima oleh kelompok. Namun, terjadi keterlambatan batas waktu pencairan dana sejak proposal disampaikan ke UPK.
 - Pembinaan tentang perkembangan kelompok belum terimplementasi sesuai prosedur dan UPK sendiri jarang melakukan pembinaan seperti ketentuan PTO.
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan belum berjalan sesuai ketentuan. Faktor lingkungan (*environmental factor*) menjadi faktor penghambat dan pendukung program karena :

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya tentang Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pada Kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan di Kecamatan Banyuasin I dapat diketahui :

1. *Idealized Policy* (Konsep yang diidealkan) sudah sesuai dengan substansi program dikarenakan :
 - Adanya sosialisasi program oleh Fasilitator Kabupaten kepada Fasilitator Kecamatan dan UPK serta kelembagaannya.

- Faktor budaya masyarakat yang menganggap dana SPP sebagai dana hibah dan tidak perlu dikembalikan menjadi faktor penghambat program.
- Faktor sosial yaitu trauma anggota kelompok untuk terlibat kembali dalam program SPP menjadi penghambat program.
- Faktor ekonomi, ketika anggota kelompok yang miskin kesulitan untuk membayar angsuran disaat usaha mereka mengalami kegagalan. merupakan faktor penghambat program. Faktor ekonomi juga sebagai penghambat program yaitu dengan adanya persaingan dari pihak lain.
- Faktor politik, yaitu dengan adanya dukungan dari pemerintah (Camat, Kades/Lurah dan perangkatnya) serta adanya dukungan masyarakat dan tokoh masyarakat merupakan faktor pendukung program.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pada Kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan di kecamatan Banyuasin I belum berjalan dengan baik. Namun demikian, beberapa hal telah terlaksana dengan baik yang terlihat dari adanya sosialisasi dan pelatihan yang diikuti oleh implementor dan kelompok sasaran.

Saran

Saran Teoritis

Untuk lebih mengembangkan studi implementasi kebijakan publik khususnya yang berhubungan dengan PNPM Mandiri Perdesaan pada kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan maka penulis mengharapkan untuk diadakan penelitian lanjutan untuk mengukur/mengevaluasi hasil dan dampak implementasi program terhadap kelompok sasaran dengan metode kuantitatif maupun kualitatif, diharapkan menggunakan model analisis yang berbeda dengan yang penulis gunakan. Penelitian selanjutnya dapat menggali informasi terhadap partisipasi masyarakat (perempuan) dalam implementasi program PNPM Mandiri Perdesaan pada kegiatan SPP.

Saran Praktis

1. Perlunya dilakukan pembinaan yang lebih intensif yaitu satu bulan sekali oleh pelaksana operasional (*implementor*)

kepada setiap kelompok SPP secara terjadwal dan periodik setiap bulannya. terutama terkait pelaporan, koordinasi dan pengembangan kelompok dalam rangka pelestarian kegiatan. Serta pembinaan tentang peningkatan tabungan kelompok.

2. Bagi kelompok (*target group*) perlu diberikan *reward* dan *punishment* dalam melakukan mekanisme pelaporan administrasi kelompok.
3. Monitoring kegiatan yang terjadwal secara rutin oleh *implementor* lapangan kepada kelompok sasaran agar implementasi program dapat berjalan sesuai prosedur.
4. Perlu adanya mutasi atau pergantian *implementor* yang tidak melaksanakan tupoksinya sesuai dengan ketentuan.
5. Pemilihan kelompok SPP yang selektif untuk mengurangi kelompok yang terlalu banyak dan fiktif.
6. Untuk desa/kelurahan yang dipengaruhi faktor budaya, sosial dan ekonomi yang bersifat menghambat implementasi, perlu dilakukan pendekatan yang intensif lagi dengan sosialisasi dan koordinasi dengan semua unsur lebih memahami substansi program PNPM MP pada kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Anwas, M. Oos. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta
- Indiahono, Dwiyanto.2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Nugroho, R. 2011. *Public Policy*. Jakarta :PT Elex Media Komputindo.
- Ripley, R.B. & Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago : The Dorsey Press.
- Sidney, Mara. 2007. *Handbook Of Public Policy Analysis : Theory, Politics and Method*. CRC Press, New York.

- Sjafari, Agus. 2014. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subarsono, A., 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi). Bandung
- BPS Sumatera Selatan. 2015. *Berita Resmi Statistik, Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan*. No. 05/01/16 Th.XXVII, 2 Januari 2015.
- BPS RI. 2015. *Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2015*. No VIII, 15 September 2015.
- BP-UPK Kecamatan Banyuasin I. 2014. *Standar Operasional Prosedur Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK)*.

Dokumen dan Laporan

- BPS Kabupaten Banyuasin. 2015. *Kecamatan Banyuasin I Dalam Angka 2015*.
- BPS Kabupaten Banyuasin. 2015. *Banyuasin Dalam Angka 2015*.
- KEPMENKO KESRA No. 25/KEP/ MENKO/ KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
- Kemendagri. 2014. *Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 2014*